

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 94 TAHUN 2026 TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA NON FISIK KABUPATEN SIAK

Abstrak:

Peraturan Bupati Siak Nomor 94 Tahun 2026 tentang Analisa Standar Belanja Non Fisik Kabupaten Siak ditetapkan sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran belanja non fisik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. Peraturan ini bertujuan mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, serta akuntabel melalui penerapan Analisa Standar Belanja (ASB) sebagai instrumen untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap kegiatan non fisik.

ASB Non Fisik menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta evaluasi terhadap usulan anggaran kegiatan. Penerapan ASB dimaksudkan untuk menghasilkan standar biaya yang wajar berdasarkan jenis kegiatan, keluaran (output), dan faktor-faktor yang memengaruhi besaran belanja sehingga dapat menghindari pemborosan, duplikasi anggaran, dan ketidakefisienan penggunaan keuangan daerah.

Peraturan ini mengatur ruang lingkup Analisa Standar Belanja Non Fisik, prinsip penerapan, komponen pembentuk biaya, tata cara penyusunan dan penggunaan ASB, serta mekanisme pengendalian, evaluasi, dan penyesuaian apabila terjadi perubahan kebijakan, kondisi ekonomi, atau kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lampiran peraturan memuat rincian model Analisa Standar Belanja Non Fisik yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pokok Pengaturan:

1. Ketentuan umum mengenai Analisa Standar Belanja Non Fisik.
2. Maksud, tujuan, dan ruang lingkup penerapan ASB Non Fisik.
3. Pedoman penyusunan dan penggunaan ASB dalam proses penganggaran daerah.
4. Komponen dan parameter perhitungan belanja non fisik.
5. Pengendalian, evaluasi, dan penyesuaian Analisa Standar Belanja.
6. Ketentuan penutup.

Dasar Hukum:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Catatan:

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Analisa Standar Belanja Non Fisik menjadi pedoman resmi bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran belanja non fisik. Penyusunan abstrak ini mengacu pada pola pengaturan Analisa Standar Belanja Kabupaten Siak yang telah berlaku pada tahun-tahun sebelumnya.